



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LKjIP

TAHUN 2022

BPBD PROVINSI JAWA TENGAH

SEKRETARIAT BPBD PROV. JATENG
TAHUN 2022

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI..... i

DAFTAR TABEL ii

DAFTAR GRAFIK..... iii

DAFTAR GAMBAR4

KATA PENGANTAR1

BAB I PENDAHULUAN2

 2.1 Latar belakang.....2

 2.2 Isu Strategis.....4

 2.3 Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi.....5

 2.4 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran.....8

 2.5 Sistematika Penulisan12

 2.6 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi Sakip 202113

BAB II PERENCANAAN KINERJA16

 2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD16

 2.2 Strategi dan Arah Kebijakan.....18

 2.3 Perjanjian Kinerja.....21

 2.4 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja25

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....26

 3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....26

 3.2 Realisasi Anggaran.....41

BAB IV P E N U T U P44

 A. Kesimpulan.....44

 B. Rekomendasi45

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Nilai Indeks Risiko Provinsi Jawa Tengah dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2021 ..3

Tabel 2 Jumlah Pegawai BPBD Provinsi Jawa Tengah.....8

Tabel 3 Rekapitulasi Jumlah PNS di BPBD Prov. Jawa Tengah.....9

Tabel 4 Sarana dan Prasarana Untuk Kondisi Tertentu Tahun 20229

Tabel 5 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi Sakip 202113

Tabel 6 Target, Indikator Tujuan dan Sasaran17

Tabel 7 Rencana Kinerja.....18

Tabel 8 Perjanjian Kinerja21

Tabel 9 Program dan Kegiatan.....22

Tabel 10 Skala Pengukuran Kinerja26

Tabel 11 Capaian Kinerja Tahun 202227

Tabel 12 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 202228

Tabel 13 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020-202230

Tabel 14 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 202231

Tabel 15 Analisis penyebab peningkatan/penurunan kinerja33

Tabel 16 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya35

Tabel 17 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan.....37

Tabel 18 Realisasi Anggaran.....41

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 Nilai Indeks Risiko Provinsi Jawa Tengah 2015 – 2021.....3

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Zona Sumber gempa Sesar Aktif2

Gambar 2 Peta Proses Bisnis6

Gambar 3 Peta Realisasi Proses Bisnis6

Gambar 4 SOTK BPBD Jawa Tengah.....7

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karuniaNya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, bahwa Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Tengah mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa output maupun outcomes.

Disisi lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur No 101 tahun 2008 tentang tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Tengah melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan 2021, Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan Rencana Strategis 2018 – 2023 serta Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022 yang telah ditetapkan.

Semarang,

**KALAKHAR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

BERGAS C PENANGGULANGAN, S.Sos, M.Si

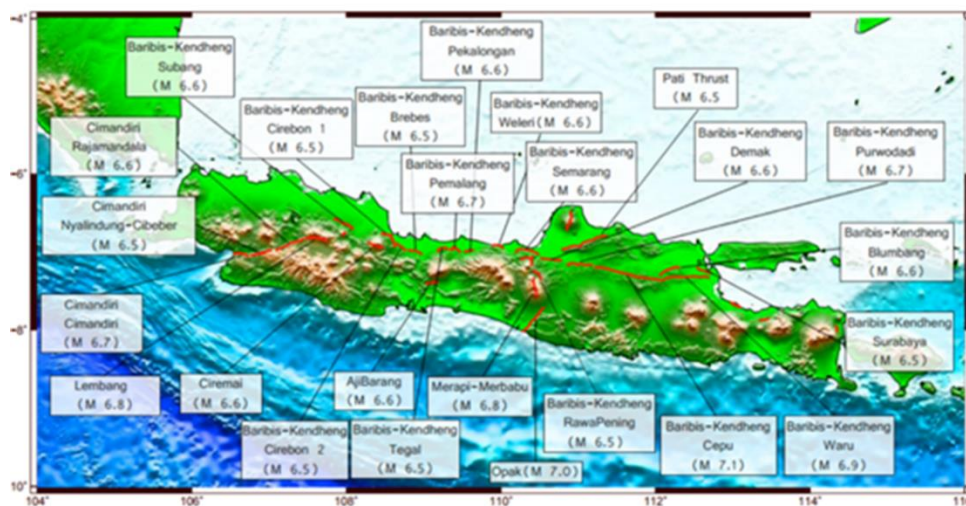
Pembina Tingkat I
NIP. 19690603 199403 1 007

BAB I PENDAHULUAN

2.1 Latar belakang

Wilayah Provinsi Jawa Tengah memiliki gunung api aktif sebanyak 5 yakni Slamet, Dieng, Sundoro, Sumbing, dan Merapi. Selain itu, Jawa Tengah pula dilintasi oleh beberapa sesar aktif yaitu Sesar Baribis Kendeng, Sesar Ajibarang, Sesar Ungaran, Sesar Merapi-Merbabu, Sesar Muria, dan Sesar Pati. Pada selatan Jawa Tengah juga terdapat Zona Megathrust Jawa dengan Segmen Jawa Tengah.

Gambar 1
Zona Sumber gempa Sesar Aktif



Kondisi ini yang menyebabkan wilayah di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah berada dalam kelas risiko sedang hingga tinggi, dengan semua jenis ancaman dimiliki di Jawa Tengah antara lain gempabumi, tsunami, letusan gunungapi, banjir, tanah longor, kekeringan, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim/abrasi, serta kebakaran hutan dan lahan. Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) 2022, Provinsi Jawa Tengah memiliki indeks risiko sedang dengan skor 115.38. Perubahan nilai Indeks Risiko Bencana di Jawa Tengah berdasarkan data BNPB tahun 2021 disajikan dalam tabel 1.

Tabel 1
Nilai Indeks Risiko Provinsi Jawa Tengah dari Tahun 2015
sampai dengan Tahun 2021

NO	KABUPATEN/KOTA	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	KLS RISIKO 2021
1	BREBES	211.20	211.20	211.20	211.20	211.20	189.94	189.94	TINGGI
2	PATI	174.00	174.00	174.00	174.00	174.00	171.10	171.10	TINGGI
3	BANYUMAS	207.20	207.20	207.20	207.20	207.20	193.71	164.25	TINGGI
4	PURWOREJO	215.20	215.20	215.20	215.20	215.20	190.01	163.63	TINGGI
5	BATANG	168.40	168.40	168.40	168.40	168.40	168.40	161.93	TINGGI
6	PEKALONGAN	183.20	183.20	183.20	183.20	183.20	172.56	160.19	TINGGI
7	TEGAL	212.80	212.80	212.80	212.80	212.80	181.08	158.93	TINGGI
8	PURBALINGGA	159.20	159.20	159.20	159.20	159.20	159.20	148.12	TINGGI
9	PEMALANG	206.00	206.00	206.00	185.70	185.70	165.97	146.38	TINGGI
10	JEPARA	163.20	163.20	163.20	163.20	163.20	148.77	135.11	SEDANG
11	KOTA PEKALONGAN	147.60	147.60	147.60	147.60	147.60	138.13	138.13	SEDANG
12	SRAGEN	142.00	142.00	142.00	142.00	142.00	142.00	133.75	SEDANG
13	GROBOGAN	162.00	162.00	162.00	162.00	162.00	154.66	131.66	SEDANG
14	REMBANG	171.60	171.60	171.60	171.60	171.60	151.12	131.73	SEDANG
15	BOYOLALI	159.20	159.20	159.20	159.20	159.20	130.32	130.32	SEDANG
16	BLORA	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	135.33	123.19	SEDANG
17	TEMANGGUNG	143.20	143.20	143.20	143.20	143.20	134.51	121.33	SEDANG
18	KUDUS	131.60	131.60	131.60	131.60	131.60	130.59	119.71	SEDANG
19	KOTA TEGAL	116.80	116.80	116.80	116.80	116.80	116.80	116.80	SEDANG
20	BANJARNEGARA	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	127.36	127.36	SEDANG
21	KEBUMEN	203.20	165.76	151.08	140.31	131.45	114.67	114.67	SEDANG
22	CILACAP	215.20	172.90	157.92	138.61	124.20	112.75	112.75	SEDANG
23	WONOGIRI	145.60	145.60	145.60	145.60	145.60	124.77	124.77	SEDANG
24	SEMARANG	143.20	143.20	143.20	143.20	143.20	118.89	118.89	SEDANG
25	KOTA SEMARANG	183.60	124.72	124.72	120.75	113.83	115.52	108.63	SEDANG
26	KOTA MAGELANG	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	SEDANG
27	DEMAK	183.60	138.20	127.42	118.21	118.21	105.77	105.21	SEDANG
28	WONOSOBO	135.20	135.20	135.20	122.94	122.94	122.94	102.83	SEDANG
29	KENDAL	167.20	156.80	142.49	124.57	111.20	98.97	100.40	SEDANG
30	KARANGANYAR	130.40	130.40	130.40	130.40	130.40	108.03	108.03	SEDANG
31	SUKOHARJO	93.20	93.20	93.20	93.20	93.20	93.20	93.20	SEDANG
32	KOTA SALATIGA	91.20	91.20	91.20	91.20	91.20	91.20	91.20	SEDANG
33	KLATEN	123.20	123.20	123.20	123.20	123.20	99.24	99.24	SEDANG
34	MAGELANG	143.20	96.86	90.82	90.82	81.07	71.16	71.16	SEDANG
35	KOTA SURAKARTA	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	67.96	67.96	SEDANG

Grafik 1
Nilai Indeks Risiko Provinsi Jawa Tengah 2015 – 2021



Dari tabel dan grafik tersebut menggambarkan pentingnya upaya Sekretariat BPBD dalam Penurunan Indeks Resiko Bencana, penurunan Indeks resiko bencana dilakukan dengan penguatan kapasitas yang tertuang dan dalam Tujuan BPBD

Provinsi Jawa Tengah, yaitu Meningkatkan ketangguhan Masyarakat Jawa Tengah dalam Penanggulangan Bencana

2.2 Isu Strategis

Dalam upaya pemenuhan peningkatan ketangguhan dalam penanggulangan bencana di Jawa Tengah. BPBD Provinsi Jawa Tengah telah memperhatikan isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu-isu strategis yang melingkupi BPBD Provinsi Jawa Tengah antara lain sebagai berikut:

1. Belum memadainya kinerja aparat dan kelembagaan penanggulangan bencana. Hal tersebut terkait dengan keterbatasan kapasitas dalam pelaksanaan penanggulangan bencana baik pra, tanggap darurat maupun upaya rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana;
2. Belum seluruh Kabupaten/Kota membentuk BPBD berdasarkan Perda, mengakibatkan kesulitan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
3. Belum terintegrasi dan terstandarisasinya mekanisme/sistem pelaporan data dan informasi kebencanaan di Jawa Tengah;
4. Belum memadainya dukungan anggaran BPBD Provinsi Jawa Tengah dan BPBD kabupaten/Kota. Masih tingginya ketergantungan pendanaan bantuan pemerintah pusat untuk tanggap darurat dan bantuan kemanusiaan;
5. Masih terbatasnya sarana prasarana PB seperti peralatan penanggulangan bencana, logistik, material kebencanaan yang lainnya;
6. Banyaknya desa yang termasuk daerah rawan bencana sedangkan fasilitasi pembentukan desa tangguh bencana di Jawa Tengah sangat terbatas;
7. Belum memadainya kompetensi sumberdaya manusia bidang PB di Jawa Tengah;
8. Belum memadainya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Jawa Tengah. Penilaian kerusakan dan kerugian pasca bencana yang tidak akurat, keterbatasan peta wilayah yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan analisa kerusakan spasial, Koordinasi penilaian kerusakan dan kerugian serta

perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang terpusat; serta Keterbatasan alokasi pendanaan bagi rehabilitasi dan rekonstruksi yang bersumber dari pemerintah daerah.

9. Belum memadainya peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Jawa Tengah.
10. Belum sinerginya penyelenggaraan penanggulangan bencana lintas sektor dan lintas wilayah.

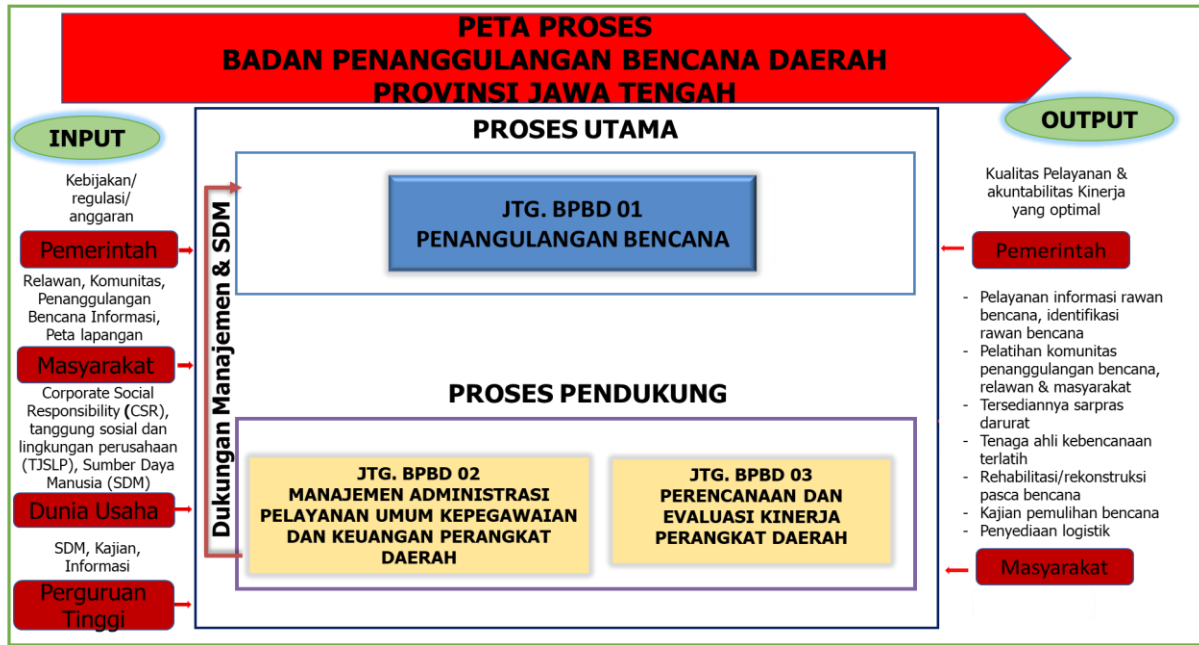
2.3 Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi

Pembentukan BPBD Provinsi diwujudkan pada tahun 2008 berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Daerah Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan untuk tugas pokok dan fungsi BPBD Provinsi Jawa Tengah, Gubernur Jawa Tengah menerbitkan Peraturan Gubernur No 101 tahun 2008 tentang tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 pasal 13 menyebutkan bahwa Sekretariat BPBD Provinsi Jawa Tengah, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Daerah Provinsi Jawa Tengah tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru yang melaksanakan sub urusan penanggulangan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana secara menyeluruh tetap berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2009 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana, sebagai dasar dalam pelaksanaan penyelenggaraan di Jawa Tengah.

Hubungan antara mandat kinerja, peta proses bisnis dan desain struktur organisasi BPBD Jawa Tengah sebagaimana tersaji dalam gambar berikut:

Gambar 2
Peta Proses Bisnis



10

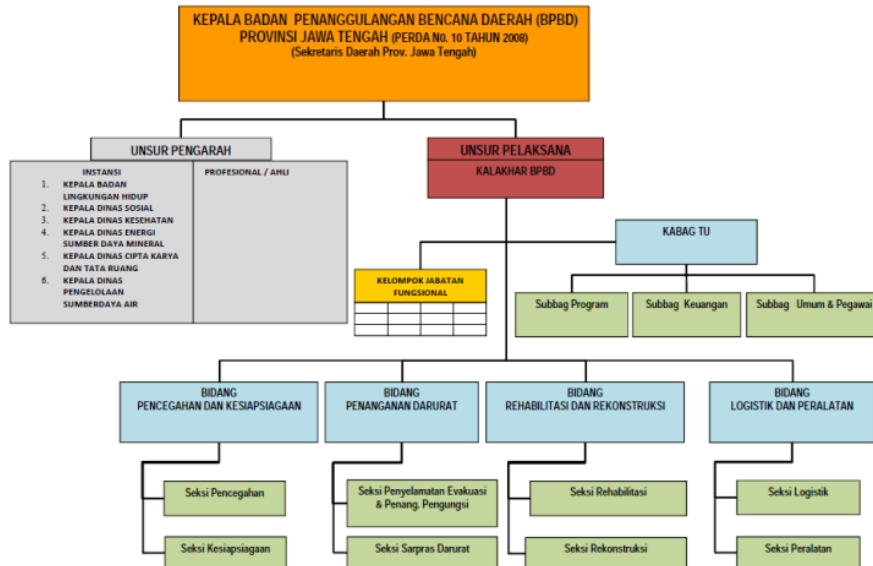
Gambar 3
Peta Realisasi Proses Bisnis



Penyusunan peta proses bisnis merupakan bagian dari penataan tata laksana dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada masing-masing Organisasi

Perangkat Daerah, sehingga dapat di implementasikan pada Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK).

Gambar 4
SOTK BPBD Jawa Tengah



2.4 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran

Upaya-upaya pengurangan risiko bencana harus dilaksanakan secara serius oleh seluruh pemangku kepentingan. Pengurangan risiko bencana merupakan tindakan untuk meminimalkan dampak bencana terhadap kehidupan manusia sehingga kerugian jiwa dan materil serta kerugian lainnya. Pengurangan risiko bencana dapat dilakukan melalui 3 (tiga) kegiatan utama, yaitu mengurangi ancaman, mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas. Namun, dalam hal ini ancaman (bahaya yang ditimbulkan dari peristiwa bencana) merupakan sebuah variable konstan atau relatif tidak dapat dikurangi. Oleh sebab itu, pemerintah memprioritaskan upaya pengurangan risiko melalui peningkatan kapasitas.

Peningkatan kapasitas diprioritaskan secara kelembagaan maupun sumberdaya baik sumberdaya manusia maupun sarana dan prasarana. Jumlah personel sumberdaya manusia di BPBD Prov Jawa Tengah cukup terbatas. Jumlah dan tingkat pendidikan sumberdaya manusia (SDM) di BPBD Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Jumlah Pegawai BPBD Provinsi Jawa Tengah

No	Pegawai	Jumlah		Pendidikan Terakhir							
		Pria	Wanita	S2	S1	D3	D4	SMA	SMP	SD	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PNS	32	8	16	7	1	2	11	3	0	40
	Non PNS										0
	a. Tenaga Teknis	33	18		35	4		10			49
	Total	45	20	13	43	4	1	19	4	1	89

Sementara untuk dukungan sumberdaya manusia yang merupakan Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara (ASN) di BPBD Provinsi Jawa Tengah menurut pangkat dan golongan adalah sebagai berikut:

Tabel 3
Rekapitulasi Jumlah PNS di BPBD Prov. Jawa Tengah
Berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin

No	Unit Kerja	Struktural					Staf					Fungsional					Jumlah												
		I		II		III	IV		Jml	I		II		III	IV			Jml											
		L	P	L	P	L	P	L		P	L	P	L	P	L	P													
1	SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0	0	0	0	0	3	6	0	9	1	0	11	0	6	4	0	1	23	0	0	0	0	5	0	3	0	8	40
	JUMLAH	0	0	0	0	0	3	6	0	9	1	0	11	0	6	4	0	1	23	0	0	0	0	5	0	3	0	8	40

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penanggulangan bencana, BPBD Prov Jawa Tengah didukung dengan beberapa peralatan baik yang bersifat umum maupun khusus, sebagaimana tabel 4 berikut.

Tabel 4
Sarana dan Prasarana Untuk Kondisi Tertentu Tahun 2022

No	Kode	Jenis Peralatan	Jumlah (unit)
1	2	3	4
I	01	Alat Transportasi	
		1 Mobil Ambulance	3
		2 Mobil Tangki BBM	
		3 Mobil Evakuasi	
		4 Mobil Pemadam Kebakaran	
		5 Helikopter	
		6 Mobil Komando	1
		7 Mobil Patroli	
		8 Mobil Jelaiah	
		9 Mobil Operasional	13
		10 Mobil Komunikasi	1
		11 Mobil Rescue	8
		12 Motor Ops	14
		13 Motor Trail	12
		14 Mobil Jenazah	1
		15 Mobil Box	2
		16 Pick Up	2
		17 Mobil Logpal	1
		18 Truk Serbaguna	1
		19 Mobil Dapur Lapangan	1
		20 Truk Logistik	1
		21 Truk Tangki Air	5
		22 Truk Urinoir MCK	2
		23 Mobil Water Treatmen	1
		24 Truk bak terbuka	2
		25 Kapal Motor	
		26 Mini Bus	1
		27 Mobil Klik	
		Jumlah	67
II	02	Alat Komunikasi dan Informasi	
		1 Sistem Komunikasi Cemat	
		2 Portable Communication Mobile	
		3 HT	21
		4 RIG	6

No	Kode	Jenis Peralatan		Jumlah (unit)
1	2	3		4
		5	GPS	3
		6	Telepon Internet Satelit	
		7	Alat Deteksi Dini dan Pemoatan Dini	
		8	SSB/RPP	3
		9	UHF	3
		10	Wireless	
		11	Meophone	3
		12	Repiter / Antena	4
		13	Video Shooting	
		14	Camera Digital	4
		15	Handycam	2
		16	Power Supply	2
			Jumlah	51
III	03	Alat Pencarian Penvelamatan dan Evakuasi		
		1	Alat Pemotong Baia dan Beton	5
		2	Rompi	
		3	Life Jacket/Rompi Pelampung	48
		4	Lifebouv	8
		5	Perahu Karet 12 org	
		6	Perahu Karet 10 org	14
		7	Perahu Karet 8 org	2
		8	Perahu Karet 6 org	1
		9	Masker Full Face	6
		10	Perahu Fiber	12
		11	Perahu Lipat + Mesin 18 PK	1
		12	Trailer	2
		13	Perahu Polyethilene + Mesin 9,8 PK	
		14	Mesin Perahu 40 PK	5
		15	Mesin Perahu 25 PK	5
		16	Mesin Perahu 18 PK	5
		17	Mesin Perahu 15 PK	1
		18	Dolphin / speed boat	2
		19	Peralatan Selam	7
		20	Vertical Rescue	6
		21	Teropong / Teleskop	4
		22	Chain Saw	6
		23	Helm SAR	4
		24	Pulav	10
		25	Breathing Appars	2
		26	Life Detector	
		27	Alat/Paket Pemadam Kebakaran	
		28	Pakaian Tahan Panas	2
		29	Pompa Perahu	14
		30	Rak Tempat Perahu Karet	5
		31	Selang BBM	14
		32	Sandaran Mesin Tempel	4
		33	Perahu Alumunium	
		34	Janakar	
		35	Ring Buoy	
		36	Tali PP 10 mm	
		37	Tangki BBM	14
		38	Davung	20
		39	Pakaian Tahan Api	
		40	Helm Tahan Panas	
		41	Sepatu	
		42	Sarung Tangan	
		43	Helm Biasa	
		44	Perahu Kayu	2

No	Kode	Jenis Peralatan		Jumlah (unit)
1	2	3		4
		45	Bidai Spinal	2
		46	Perahu Amphibi	1
			Jumlah	222
IV	04	Alat Pemenuhan Kebutuhan Dasar		
		1	WTP 250 lt	2
		2	WTP 500 lt	0
		3	WTP mini	2
		4	Dapur Lapangan/Umum	
		5	Fleksible Tank 2000 lt	2
		6	Fleksible Tank 1000 lt	2
		7	Toilet Lapangan	
		8	Tenda Posko	13
		9	Tenda Keluarga	100
		10	Tenda Regu	30
		11	Tenda Pleton	24
		12	Tenda Pengungsi	5
		13	Tenda Sekolah	
		14	Tenda Lapangan	
		15	Tenda RS Lapangan	
		16	Tenda Individu	2
		17	Tenda Doom	
		18	Tandu Lipat	6
		19	Echosounder	2
		20	Velbed	125
		21	Tandon Air Plastik	
		22	Tandon Air Fiber Glas	1
		23	Tandu Spinal	
		24	Tenda Terpal Plastik	
		25	Jas Hujan	
		26	MCK Komunal	
			Jumlah	316
V	05	Alat Berat		
		1	Scoop Loader	-
		2	Back Hoe	-
		3	Truck W Crane 3 Ton	-
		4	Tandem Vibration Roller 4 Ton	-
		5	Crane on Wheel 15 Ton	-
		6	Wheel Loader 1.2 - 1.5 M3	-
		7	Head Tractor & trailer	-
		8	Loader	-
		9	Exavator	-
		10	Dump Truck	-
		11	Grader	-
		12	Bulldoser	-
		13	Ponton	-
		14	Vibro Hammer	-
		15	Wheel Loader	-
		16	Ulhantor Roller	-
			Jumlah	-
VI	06	Alat Penerangan dan Kelistrikan		
		1	Senter	9
		2	Solar Sel Generator	
		3	Lampu Senter HID	2
		4	Lampu Srt Halogen	3
		5	Lampu Badai	
		6	Genset 5 KVA	2
		7	Genset 10 KVA	1
		8	Genset 1.2 KW	4

No	Kode	Jenis Peralatan		Jumlah (unit)
1	2	3		4
		9	Genset 1000 watt	6
		10	Solar Handle Lamp	60
		11	Lampu Penerangan (Solar Cell)	7
		12	Light Tower Port	2
		13	Lampu senter HID Search Light	4
		14	Kabel	3
		15	Tiang Lampu Lapangan	
		16	Lampu Lapangan (Sport Light)	4
		17	Senter Besar	
		18	Lampu Rotator	
		19	Lampu Sorot	
		20	Emergency Lamp	6
			Jumlah	
VII	7	Alat Peroudangan		
		1	Froklift	2
		2	Hand Froklift	1
		3	Gerobak Sorong	-
		4	Trolley	2
		5	Rak Gondola	
		6	Palka	100
		7	Safety Equipment	
		8	Tenda Gudang	
		9	Water Closed	
		10	Tabung Gas 12 Kg	
		11	Tabung Gas 3 Kg	
		12	Selang	
		13	Helm Keria / PMK	
		14	Topi Provek	
			Jumlah	105
VIII	8	Alat Lainnya		
		1	Pompa air	6
		2	Kawat Broniong	
		3	Karung Plastik	-
		4	Garpu Sampah	-
		5	Diraen 40 L	-
		6	Hand Sprayer	-
		7	Knock Down Closet	-
		8	Mesin Fogging	-
		9	Drag Bar	-
		10	Water purifier	-
		11	CCTV	-
			Jumlah	6
			Jumlah Total	897

Dukungan sarana dan prasarana yang dikelola BPBD Prov. Jawa Tengah digunakan untuk penanggulangan bencana secara menyeluruh, dari pra bencana (pecegahan dan kesiapsiagaan), tanggap darurat, dan pasca bencana.

2.5 Sistematika Penulisan

Sistematika yang digunakan penulis akan memuat uraian secara garis besar dari isi penelitian dalam tiap bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I – PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan menguraikan tentang latar belakang, tugas pokok dan fungsi, sumber daya, visi dan misi, tujuan, saran, rumusan masalah/isu-isu strategis dalam penanggulangan bencana di Jawa Tengah dan sistematika penulisan.

BAB II – PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini akan dibahas mengenai perencanaan kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

BAB III – AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam bab ini akan dijelaskan mulai dari capaian kinerja organisasi dari sasaran strategis 1 hingga sasaran strategis 5 dalam kinerja di tahun 2022.

BAB IV – PENUTUP

Dalam bab ini menjelaskan kesimpulan dan saran yang didalamnya menjelaskan tentang sasaran strategis masuk kedalam kinerja sangat baik serta saran peningkatan kinerja di masa mendatang.

2.6 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi Sakip 2021

Tindak lanjut dari evaluasi SAKIP 2021 dapat dijelaskan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5
Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi Sakip 2021

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1.	Mengkaitkan hasil pengukuran capaian kinerja dari setingkat eselon IV ke atas dengan pemberian reward dan punishment.	a. Evaluasi capaian kinerja saat Rapat Pengendalian Operasional (POK) setiap awal bulan sebelum tanggal 10; b. Pemberian reward dan punishment, akan diberikan dalam bentuk Nota Dinas Hasil Capaian Kinerja 2021 berupa teguran dan pemberitahuan ketercapaian indikator kinerja kepada masing-masing bidang/bagian pada triwulan IV (bulan Desember) Tahun 2021.
2.	Melakukan upaya untuk meningkatkan keadaan informasi kinerja yang telah tersaji dalam dokumen LKjIP agar dapat lebih dimanfaatkan untuk penilaian serta perbaikan	Nota Dinas Kalakhar kepada bidang/bagian agar memedomani Dokumen LKjIP Tahun 2020 dalam pencapaian target kinerja yang sudah tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2021.

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut
	penyelenggaraan program dan kegiatan	
3.	Memanfaatkan secara maksimal hasil evaluasi internal untuk penilaian akuntabilitas kinerja seluruh unit kerja organisasi dan pemberian rekomendasi perbaikan manajemen kinerja yang sudah dilaksanakan.	a. Rapat Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) secara rutin setiap awal bulan; b. Bukti Rencana Tindak Lanjut pemenuhan target capaian kinerja yang ditandatangani oleh masing-masing Bidang/Bagian.
4.	Segara menindaklanjuti hasil pemeriksaan kinerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah tahun 2020.	Memenuhi tindaklanjuti hasil pemeriksaan kinerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah tahun 2020 melalui Surat Kepala Pelaksana Harian BPBD Tanggal 17 Mei 2021 Nomor 052/4084/2021 perihal Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2020.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD

BPBD Provinsi Jawa Tengah mempunyai fungsi strategis dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana (PB) di Provinsi Jawa Tengah yang dilakukan secara teintegrasi pada tiga tahapan bencana, yaitu pra bencana, darurat, dan pascabencana. Visi dan misi BPBD Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

1. Visi Jawa Tengah 2018 – 2023

MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI “Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”

2. Misi

- a. Membangun masyarakat Jateng, yg religius, toleran & guyup untuk menjaga NKRI
- b. Mempercepat Reformasi yg dinamis serta memperluas sasaran ke pemb kab/kota;
- c. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja utk mengurangi kemiskinan dan pengangguran;
- d. Menjadikan rakyat Jateng lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan.

3. Tujuan

- Membangun sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
- Mewujudkan sumberdaya alam dan lingkungan hidup Jawa Tengah yang lestari dan berkelanjutan

4. Sasaran

- Meningkatnya kualitas air, udara, serta tutupan lahan
- Meningkatnya ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana.

Sekretariat BPBD melaksanakan tugas dan fungsi sesuai sasaran Pemerintah Daerah ke-2 yaitu “meningkatkan ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana” dengan tujuan meningkatkan ketangguhan masyarakat Jawa Tengah dalam penanggulangan bencana serta meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah.

Tabel 6
Target, Indikator Tujuan dan Sasaran

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Target Kinerja Pada Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatkan ketangguhan masyarakat Jawa Tengah dalam penanggulangan bencana		Indeks Ketahanan Daerah dalam PB	3.52	3,54	3,55	3,58	3,60
	Meningkatnya upaya mitigasi, pencegahan, kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana	Persentase penambahan kapasitas wilayah PB di daerah rawan bencana	10%	10%	10%	10%	10%
	Meningkatnya kapasitas penyelamatan dan penanganan masyarakat terdampak bencana	Persentase penambahan kapasitas relawan TRC/ pemangku kepentingan PB	5%	5%	5%	5%	5%
	Meningkatnya kapasitas dan upaya pemulihan pasca bencana	Persentase pemulihan pasca bencana yang terealisasi	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana	Persentase kecukupan kebutuhan dasar	100%	100%	100%	100%	100%

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Target Kinerja Pada Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
	peralatan dan logistik bencana	dan peralatan masyarakat terdampak yang terpenuhi					
Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah		Nilai kepuasan masyarakat	70	75	80	85	90
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Nilai kepuasan masyarakat	70	75	80	85	90
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Sakip BPBD Prov Jateng	65	66	67	68	70

2.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk memenuhi target tujuan dan sasaran, sekretariat BPBD Provinsi Jawa Tengah menetapkan strategi dan arah kebijakan yang dapat dilihat pada tabel dibawah

Tabel 7
Rencana Kinerja

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatkan ketangguhan masyarakat Jateng dalam penanggulangan bencana		Indeks ketahanan daerah dalam PB	Angka	3.57
a		Meningkatnya upaya mitigasi, pencegahan, kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana	Persentase penambahan kapasitas PB di wilayah Rawan bencana	%	10
b		Meningkatnya kapasitas penyelamatan dan penanganan masyarakat terdampak bencana	Persentase penambahan kapasitas relawan TRC/pemangku kepentingan PB	%	5
c		Meningkatnya kapasitas dan upaya pemulihan pasca bencana	Persentase pemulihan pasca bencana yang terealisasi	%	100

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
d		Persentase kecukupan kebutuhan dasar dan peralatan masyarakat terdampak yang terpenuhi	Persentase kecukupan kebutuhan dasar dan peralatan masyarakat terdampak yang terpenuhi	%	100
2.	Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah		Nilai Kepuasan Masyarakat	Angka	85
		Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Nilai Kepuasan Masyarakat	Angka	85
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Sakip BPBD Prov Jateng	Angka	68

No.	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
1.	Meningkatnya upaya mitigasi, pencegahan, kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana	1. Menyediakan data, informasi daerah rawan dan risiko bencana di Jawa Tengah; 2. Memberdayakan masyarakat di daerah rawan bencana; 3. Menyediakan sarana dan prasarana mitigasi, pencegahan dan kesiapsiagaan bencana; 4. Melakukan pendampingan dan pelatihan kesiapsiagaan, serta pendidikan kebencanaan bagi masyarakat.	1. Mewujudkan kesadaran masyarakat di daerah rawan bencana melalui Identifikasi dan Sosialisasi Daerah Rawan Bencana Jawa Tengah; 2. Terwujudnya dokumen kajian penanggulangan bencana dan dokumen rencana penanggulangan bencana sebagai dasar penanggulangan bencana yang terarah dan tepat guna; 3. Mengembangkan dan meningkatkan pemasangan alat peringatan dini bencana; 4. Mengembangkan dan meningkatkan pemasangan rambu petunjuk jalur 5. Mewujudkan masyarakat desa tangguh dalam menghadapi bencana di Jateng; 6. Mengembangkan dan mewujudkan kepedulian masyarakat dalam bencana di Jawa Tengah melalui organisasi komunitas;
2.	Meningkatnya kapasitas penyelamatan dan	1. Menyediakan data dan melakukan pemantauan kejadian bencana di Jateng;	1. Mengembangkan PB berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pemantauan bencana; 2. Meningkatkan kapasitas

No.	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
	penanganan masyarakat terdampak bencana	2. Memberdayakan relawan, komunitas, pemangku kepentingan PB dalam PB; 3. Menyelenggarakan simulasi, latihan gabungan antar pemangku kepentingan; 4. Melakukan penguatan, pendampingan kabupaten/kota dalam penanganan darurat bencana dan antar penggiat kebencanaan.	personil pusat pengendali operasi penanggulangan bencana (pusdalops PB); 3. Meningkatkan kapasitas tim reaksi cepat (TRC) dan relawan penanggulangan bencana; 4. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar pemangku kepentingan PD dalam latihan gabungan dan simulasi penanganan bencana; 5. Meningkatkan koordinasi teknis pelaksanaan lapangan dalam penanganan darurat bencana (aktivasi posko tanggap darurat); 6. Meningkatkan kapasitas dalam pertolongan dan evakuasi dan pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi.
3.	Meningkatnya kapasitas dan upaya pemulihan pasca bencana	1. Menyediakan data sarana dan sarana terdampak bencana; 2. Melakukan pelatihan, bintek peningkatan kapasitas pemangku kepentingan dalam kajian perhitungan kebutuhan pasca bencana; 3. Melakukan penguatan kerjasama dalam penanggulangan bencana.	1. Meningkatkan kemampuan aparat PB dalam perhitungan kerusakan dan kerugian akibat bencana; 2. Sinergi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana antar sector; 3. Meningkatkan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana.
4.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana peralatan dan logistik bencana	1. Menyediakan logistik penyelamatan dan evakuasi bencana; 2. Melakukan penguatan lintas sektor dalam pemenuhan logistik penanganan pengungsi; 3. Menyediakan peralatan, sarana dan prasarana PB; 4. Melakukan penguatan kerjasama lintas sektor dalam pemanfaatan peralatan penanggulangan bencana;	1. Memaksimalakan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana; 2. Meningkatkan koordinasi lintas sektor pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat pada kebutuhan logistik di pengungsian; 3. Meningkatkan peralatan penanggulangan bencana; 4. Meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam penanganan kebencanaan terutama pada pemenuhan kapasitas peralatan.
5.	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan sesuai fungsi BPBD	1. Mengembangkan kapasitas SDM bidang PB berbasis kompetensi; 2. Mengembangkan PB berbasis ilmu pengetahuan dan

No.	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
			teknologi; 3. Mengembangkan system informasi pengelolaan data dan informasi bencana secara terpadu; 4. Mewujudkan pembangunan berwawasan pengurangan risiko bencana.
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Mengembangkan sistem manajemen kinerja yang berorientasi pada hasil	1. Mengembangkan komunikasi massa dan keterbukaan informasi publik; 2. Penyelenggaraan PB yang sinergi dan terpadu antar wilayah; 3. Mewujudkan Penyelenggaraan PB yang sinergi dan terpadu antar wilayah.

2.3 Perjanjian Kinerja

Menyajikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Tabel 8
Perjanjian Kinerja

NO.	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
	Tujuan 1			
1.	Meningkatkan ketangguhan masyarakat Jateng dalam penanggulangan bencana	Indeks ketahanan daerah dalam PB	Angka	3.56
	Sasaran:			
1.1	Meningkatnya upaya mitigasi, pencegahan, kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana	Persentase penambahan kapasitas PB di wilayah Rawan bencana	%	5
1.2.	Meningkatnya kapasitas penyelamatan dan penanganan masyarakat terdampak bencana	Persentase penambahan kapasitas relawan TRC/pemangku kepentingan PB	%	3
1.3.	Meningkatnya kapasitas dan upaya pemulihan pasca bencana	Persentase pemulihan pasca bencana yang terealisasi	%	100

NO.	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.4.	Persentase kecukupan kebutuhan dasar dan peralatan masyarakat terdampak yang terpenuhi	Persentase kecukupan kebutuhan dasar dan peralatan masyarakat terdampak yang terpenuhi	%	100
	Tujuan 2			
2.	Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah	Nilai Kepuasan Masyarakat	Angka	85
	Sasaran:			
2.1.	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Nilai kepuasan masyarakat	Angka	85
2.2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Sakip BPBD Prov Jateng	Angka	68

Perjanjian kinerja BPBD Provinsi Jawa Tengah yang telah disepakati dengan Gubernur Jawa Tengah meliputi tujuan dan sasaran yang dicapai melalui 2 (dua) Program dan 11 (sebelas) kegiatan yang didukung oleh APBD Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp 16.163.495.000.- yang dapat dilihat pada tabel program dibawah:

Tabel 9
Program dan Kegiatan

No	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	100%	250.000.000
a	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun	10 Dokumen	250.000.000
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100%	11.178.495.000
b	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	1 Dokumen	6.263.495.000
c	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 Dokumen	100.000.000

No	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
d	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Dokumen	10.000.000
e	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	1 Dokumen	1.206.000.000
f	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Dokumen	2.789.000.000
g	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Dokumen	810.000.000
2.	Program Penanggulangan Bencana	Persentase penurunan risiko bencana	2%	2.885.000.000
a	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Persentase desa yang memperoleh pelayanan informasi rawan bencana	1%	1.250.000.000
b	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Persentase upaya PRB Jateng	1%	1.635.000.000
	Program Penanggulangan Bencana	Persentase penanganan darurat kebencanaan	100%	600.000.000
a	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah pemangku kepentingan yang dilatih	1.000	200.000.000
b	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase laporan masyarakat tentang kejadian bencana yang ditindaklanjuti	100%	400.000.000
	Program Penanggulangan Bencana	Persentase rehab rekon pasca bencana	100%	400.000.000
a	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Persentase wilayah terdampak bencana yang direhab/rekon pasca bencana	100%	250.000.000
b	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah rekomendasi kerjasama yang diinisiasi dan dokumen kajian perencanaan pemulihan yang disusun	1 Dokumen	150.000.000
	Program Penanggulangan Bencana	Persentase pemenuhan logistik bencana	100%	850.000.000

No	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
a	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Persentase pengelolaan peralatan PB yang dilaksanakan	100%	300.000.000
b	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase masyarakat terdampak yang tertangani	100%	550.000.000

Ada perbedaan antara target kinerja, renja dan renstra berjalan karena pada saat penyusunan renja tahun 2021 terjadi perubahan target karena adanya refokusing anggaran untuk penanggulangan covid-19. Sehingga dengan anggaran yang berkurang maka target pun harus berkurang karena berkurangnya anggaran, dengan berubahnya target maka disusunlah renstra perubahan dengan penyesuaian target akan tetapi berjalannya waktu pemulihan dari dampak covid-19 maka renstra perubahan tidak disetujui/dibatalkan dan kembali kepada target renstra murni 2018 – 2023. Dengan tidak disetujuinya perubahan renstra maka target yang sudah terealisasi dengan target perubahan pada tahun 2021 maka akan berpengaruh pada target renja tahun berikutnya.

2.4 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

Instrumen pendukung dalam penambahan kapasitas penanggulangan bencana dengan maksimal, maka perlunya pemetaan daerah rawan bencana sebagai tujuan utama penambahan kapasitas. Maka dengan mengetahui lokasi wilayah rawan, risiko dan kerentanan bencana dengan 14 ancaman yang ada di Jawa Tengah maka kita akan bisa dengan tepat menambahkan kapasitas dan intervensi kepada masyarakat terdampaknya akan lebih tepat sasaran dan tepat guna untuk upaya pengurangan risiko bencana di Jawa Tengah.

Gambar 5
Inarisk BNPB



Didalam aplikasi berbasis web ini kita bisa mengunduh peta berbentuk *png*, dokumen kajian risiko bencana (KRB), rencana penanggulangan bencana (RPB), dan sekaligus bisa menyimpan data hasil pilah yang akan kita gunakan sebagai dasar menentukan wilayah rawan sedang-tinggi bencana yang akan kita intervensi penambahannya. Penambahan kapasitas bisa berupa penambahan kemampuan dan pengenalan masyarakat dalam menghadapi bencana, membangun desa tangguh bencana di daerah rawan tersebut, mengembangkan dan memasang *early warning system* (EWS) serta membentuk forum pengurangan risiko bencana (FPRB) didalam desa tersebut.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, yang telah ditetapkan dalam Visi dan Misi BPBD Provinsi Jawa Tengah. Pengukuran dimaksud merupakan suatu hasil penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran, dan hasil. Aspek penilaian tidak terlepas dari kegiatan mengolah dan masukan untuk diproses menjadi keluaran penting dan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran dengan kategori sangat baik, baik, cukup dan kurang (tabel 6).

Tabel 10
Skala Pengukuran Kinerja

No	Kategori	Skala Capaian Kinerja
1	2	3
1	Sangat Baik	>100%
2	Baik	85-100%
3	Cukup	65-84,99%
4	Kurang	50-64,99%
5	Sangat Kurang	<50%

BPBD Prov Jawa Tengah TA 2022 telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana Perjanjian Kinerja (PK) dan Rencana Strategis (Renstra), hal tersebut dituangkan dalam tabel capaian kinerja tahun 2022.

Tabel 11
Capaian Kinerja Tahun 2022

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022			Target Akhir RPJMD
				Target	Realisasi	Persentase	
1	Tujuan: Meningkatkan ketangguhan masyarakat Jateng dalam penanggulangan bencana	Indeks ketahanan daerah dalam PB	angka	3.57	3.65	102.24	3.60
Sasaran:							
	Meningkatnya upaya mitigasi, pencegahan, kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana	Persentase penambahan kapasitas PB diwilayah rawan bencana	%	10	10.35	103.50	50
	Meningkatnya kapasitas penyelamatan dan penanganan masyarakat terdampak bencana	Persentase penambahan kapasitas relawan TRC/pemangku kepentingan PB	%	5	12.83	256.60	25
	Meningkatnya kapasitas dan upaya pemulihan pasca bencana	Persentase pemulihan pasca bencana yang terealisasi	%	100	100	100	100
	Persentase kecukupan kebutuhan dasar dan peralatan masyarakat terdampak yang terpenuhi	Persentase kecukupan kebutuhan dasar dan peralatan masyarakat terdampak yang terpenuhi	%	100	100	100	100
2	Tujuan: Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah	Nilai Kepuasan Masyarakat	angka	85	86.67	101.96	90

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022			Target Akhir RPJMD
				Target	Realiasi	Persentase	
	Sasaran:						
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Nilai kepuasan masyarakat	angka	85	86.67	101.96	90
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Sakip BPBD Prov Jateng	angka	68	76.22	112.09	70

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah telah memenuhi target bahkan terdapat beberapa sasaran yang melampaui target hal itu dapat dijelaskan dengan cara perbandingan realisasi kinerja tahun ini.

3.1.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Kinerja organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Tengah, kinerja sasaran strategis dari 2 (dua) Tujuan dengan kategori sangat baik dapat tercapai dari sasaran organisasi BPBD Provinsi Jawa Tengah dengan 6 (enam) Sasaran Organisasi dengan kriteria sangat baik berjumlah 4 dan 2 dengan kategori baik. Untuk kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 12
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1	Tujuan: Meningkatkan ketangguhan masyarakat Jateng dalam penanggulangan bencana	Indeks Ketahanan Daerah	3.57	3.65	102.24	Sangat Baik	Econtrolling
	Sasaran:						
1.1	Meningkatnya upaya mitigasi, pencegahan,	Persentase penambahan kapasitas PB	10	10.35	103.50	Sangat Baik	Econtrolling

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
	kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana	diwilayah rawan bencana					
1.2	Meningkatnya kapasitas penyelamatan dan penanganan masyarakat terdampak bencana	Persentase penambahan kapasitas relawan TRC/pemangku kepentingan PB	5	12.83	256.60	Sangat Baik	Econtrolling
1.3	Meningkatnya kapasitas dan upaya pemulihan pasca bencana	Persentase pemulihan pasca bencana yang terealisasi	100	100	100	Baik	Econtrolling
1.4	Persentase kecukupan kebutuhan dasar dan peralatan masyarakat terdampak yang terpenuhi	Persentase kecukupan kebutuhan dasar dan peralatan masyarakat terdampak yang terpenuhi	100	100	100	Baik	Econtrolling
2	Tujuan: Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah	Nilai Kepuasan Masyarakat	85	86.67	101.96	Sangat Baik	Econtrolling
	Sasaran						
2.1	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Nilai kepuasan masyarakat	85	86.67	101.96	Sangat Baik	Econtrolling
2.2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Sakip BPBD Prov Jateng	68	76.22	112.09	Sangat Baik	Econtrolling

3.1.2 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2020-2022

Tabel 13
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2022

N O	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	2020			2021			2022		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1	Tujuan: Meningkatkan ketangguhan masyarakat Jateng dalam penanggulangan bencana	Indeks Ketahanan Daerah	3.54	3.54	100	3.55	3.55	100	3.57	3.65	102.24
	Sasaran:										
1.1	Meningkatnya upaya mitigasi, pencegahan, kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana	Persentase penambahan kapasitas PB di wilayah rawan bencana	10	10.71	107.1	5	7.29	145.72	10	10.35	103.50
1.2	Meningkatnya kapasitas penyelamatan dan penanganan masyarakat terdampak bencana	Persentase penambahan kapasitas relawan TRC/pemangku kepentingan PB	5	5.10	102	3	6.30	210	5	12.83	256.60
1.3	Meningkatnya kapasitas dan upaya pemulihan pasca bencana	Persentase pemulihan pasca bencana yang terealisasi	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1.4	Persentase kecukupan kebutuhan dasar dan peralatan masyarakat terdampak yang terpenuhi	Persentase kecukupan kebutuhan dasar dan peralatan masyarakat terdampak yang terpenuhi	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.	Tujuan: Meningkatkan tata kelola	Nilai Kepuasan Masyarakat	78	82.34	105.56	80	82.66	103.33	85	86.67	101.96

N O	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	2020			2021			2022		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
	organisasi perangkat daerah										
2.1	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Nilai kepuasan masyarakat	75	82.34	109.79	80	82.66	103.33	85	86.67	101.96
2.2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Sakip BPBD Prov Jateng	66	72.26	109.48	67	75	111,94	68	76.22	112.09

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja Sasaran BPBD Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 yaitu konsisten diatas 100 Persen. Pada indikator kinerja sasaran yang pertama mengalami konsistensi tahun 2020-2022, pada sasaran Meningkatkan kapasitas penyelamatan dan penanganan masyarakat terdampak bencana pada tahun 2021-2022 capaian diatas 200% hal ini disebabkan adanya upaya pemenuhan melalui hybrid (zoom), ini sebagai bentuk upaya adaptasi baru pada pandemi Covid-19.

3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2022

Perbandingan target dan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dibandingkan dengan target kinerja jangka menengah yang ada dalam Dokumen Renstra BPBD Provinsi Jawa Tengah dapat diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 14
Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2022

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2022	Target Akhir 2023	Tingkat Kemajuan
1	Tujuan: Meningkatkan ketangguhan masyarakat Jateng dalam penanggulangan bencana	Indeks Ketahanan Daerah	3,65	3,6	101,39

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2022	Target Akhir 2023	Tingkat Kemajuan
	Sasaran:				
1.1	Meningkatnya upaya mitigasi, pencegahan, kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana	Persentase penambahan kapasitas PB diwilayah rawan bencana	38,41	50	76,82
1.2	Meningkatnya kapasitas penyelamatan dan penanganan masyarakat terdampak bencana	Persentase penambahan kapasitas relawan TRC/pemangku kepentingan PB	42,23	25	168,92
1.3	Meningkatnya kapasitas dan upaya pemulihan pasca bencana	Persentase pemulihan pasca bencana yang terealisasi	100	100	100
1.4	Persentase kecukupan kebutuhan dasar dan peralatan masyarakat terdampak yang terpenuhi	Persentase kecukupan kebutuhan dasar dan peralatan masyarakat terdampak yang terpenuhi	100	100	100
2	Tujuan: Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah	Nilai Kepuasan Masyarakat	86,67	90	96,3
	Sasaran				
2.1	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Nilai kepuasan masyarakat	86,67	90	96,3
2.2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Sakip BPBD Prov Jateng	76,22	70	108,89

Dari tabel perbandingan diatas terdapat 1 (satu) tujuan dan 2 (dua) sasaran yang memiliki tingkat kemajuan pada tahun 2022 melebihi target akhir pada tahun 2023. Hal ini terjadi karena pada tujuan indeks kinerja indeks ketahanan daerah (IKD) pada tahun 2022, dimana perhitungan nilai indeks ketahanan daerah dilakukan secara mandiri oleh kabupaten/kota dan difasilitasi oleh BPBD Provinsi dan di verifikasi langsung oleh BNPB. Dari hasil penilaian tersebut didapati nilai IKD Provinsi Jawa Tengah hasil dari perhitungan mandiri Provinsi Jawa Tengah sendiri dengan nilai akhir 3.65, nilai ini sudah melebihi target dari indeks akhir tahun 2023. Sedangkan untuk sasaran yang melebihi target kinerja 100% adalah Persentase penambahan kapasitas relawan TRC/pemangku kepentingan

PB dari meningkatnya kapasitas penyelamatan dan penanganan masyarakat terdampak bencana ini dipengaruhi oleh masa pandemi covid-19 dengan melakukan pelatihan dengan menggunakan sistem *hybrid* dan dengan sistem ini jumlah peserta paling banyak melalui *zoom* untuk pelatihan dan pengenalan dasar penambahan kapasitas TRC di Jawa Tengah. Dan pada sasaran ke dua yang memiliki target lebih dari 100% terhadap target akhir 2023 adalah nilai *sakip* dengan meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah, ini adalah nilai *given* yang diberikan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dengan hasil kinerja akuntabilitas perangkat daerah BPBD Provinsi Jawa Tengah dengan nilai akhir pada tahun 2022 sebesar 76,22.

3.1.4 Analisis penyebab peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Secara umum kinerja BPBD Provinsi Jawa Tengah tahun 2022 sangat baik dengan 2 (dua) tujuan dan 6 (enam) sasaran dengan pencapaian 100%, dan ada 1 sasaran dengan capaian kinerja lebih dari 200%, sebagai berikut:

Tabel 15
Analisis penyebab peningkatan/penurunan kinerja

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	Tujuan: Meningkatkan ketangguhan masyarakat Jateng dalam penanggulangan bencana	Indeks Ketahanan Daerah	3.57	3.65	102.24	Pada tahun 2021 dan 2022 dilakukan penilaian mandiri indeks Ketahanan daerah oleh provinsi	Melibatkan OPD terkait pada saat melakukan perhitungan mandiri dan pemenuhan dokumen
	Sasaran:						
1.1	Meningkatnya upaya mitigasi, pencegahan, kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana	Persentase penambahan kapasitas PB di wilayah rawan bencana	10	10.35	103.50	Keterwakilan penduduk desa sekitar pada saat pelaksanaan kegiatan	Optimalisasi pelaksanaan kegiatan identifikasi dan sosialisasi daerah rawan bencana dengan menambahkan keterwakilan desa sekitar
1.2	Meningkatnya kapasitas penyelamatan dan penanganan masyarakat	Persentase penambahan kapasitas relawan TRC/pemangku	5	12.83	256.60	Percepatan pelaksanaan kegiatan & penambahan jumlah peserta, serta	optimalisasi pelaksanaan bintek relawan TRC secara hibrid, peserta meningkat

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
	terdampak bencana	kepentingan PB				kegiatan dilaksanakan melalui metode <i>hybrid</i>	menjadi berjumlah 665 (165 luring dan 500 daring) ditambah gubernur mengajar sebanyak 1.900 peserta (400 luring dan 1.500 daring)
2	Tujuan: Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah	Nilai Kepuasan Masyarakat	85	86.67	101.96	BPBD memberikan layanan dengan cepat, mudah	Dengan terus melakukan peningkatan kualitas pelayanan
2.1	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Nilai kepuasan masyarakat	85	86.67	101.96	BPBD memberikan layanan dengan cepat, mudah	Dengan terus melakukan peningkatan kualitas pelayanan
2.3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Sakip BPBD Prov Jateng	68	76.22	112.09	komitmen dan antusiasme BPBD dalam reformasi birokrasi	Terus meningkatkan komitmen dan upaya dalam pemenuhan reformasi birokrasi yang akuntabel

Dari hasil analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan, BPBD Provinsi Jawa Tengah dengan tingkat keberhasilan lebih dari 200% ada 1 sasaran yaitu Persentase penambahan kapasitas relawan TRC/pemangku kepentingan PB dengan analisis keberhasilan BPBD Provinsi Jawa Tengah melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan dan melaksanakan kegiatan dengan sistem *hybrid* dimana jumlah peserta membeludak dengan capaian dalam satu kegiatan pelaksanaan bintek relawan TRC secara *hybrid*, peserta meningkat menjadi berjumlah 665 (165 luring dan 500 daring) ditambah dengan kegiatan Gubernur mengajar sebanyak 1.900 peserta (400 luring dan 1.500 daring).

3.1.5 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dapat dijelaskan dalam tabel dibawah:

Tabel 16
Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO	Tujuan/ Sasaran	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			Tingkat Efisiensi
		Target	Reallisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
1	Tujuan: Meningkatkan ketangguhan masyarakat Jateng dalam penanggulangan bencana	3.57	3.65	102.24	4,735,000,000	4,474,424,224	94.50	5.50
	Sasaran:							
1.1	Meningkatnya upaya mitigasi, pencegahan, kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana	10	10.35	103.50	2.885.000.000	2.676.359.195	92.77	7.23
1.2	Meningkatnya kapasitas penyelamatan dan penanganan masyarakat terdampak bencana	5	12.83	256.60	600.000.000	558.987.256	93,16	6.84
1.3	Meningkatnya kapasitas dan upaya pemulihan pasca bencana	100	100	100	400.000.000	397.412.500	99,35	0.65
1.4	Persentase kecukupan kebutuhan dasar dan peralatan masyarakat terdampak yang terpenuhi	100	100	100	850.000.000	841.665.273	99,02	0.98
2	Tujuan: Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah	85	86.67	101.96	11.428.495.000	11.140.124.513	97,48	2,52
2.1	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	85	86.67	101.96	11.178.495.000	10.903.769.709	97,54	2,46

NO	Tujuan/ Sasaran	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
2.2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	68	76.22	112.09	250.000.000	236.354.804	94,54	5.46

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa dalam pemenuhan Tujuan 1 (satu) meningkatkan ketangguhan masyarakat Jateng dalam penanggulangan bencana terdapat efisiensi sumber daya sebesar Rp 260.575.776 atau sebesar 5.51% dari total pagu anggaran Rp 4,735,000,000 efisiensi tertinggi terdapat pada sasaran meningkatnya upaya mitigasi, pencegahan, kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana sebesar 7.23% atau sebesar Rp 208,640,805 dari total pagu Rp 2.885.000.000, hal ini adalah efisiensi dari kegiatan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana, penyusunan rencana kontijensi dan gladi kesiapsiagaan terhadap bencana terdapat efisiensi dari honor narasumber. sedangkan untuk tujuan 2 (dua) meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah terdapat efisiensi sebesar 2.46% atau sebesar Rp 274,725,291 dari total pagu Rp 11.178.495.000, hal ini adalah efisiensi dari kegiatan bahan cetak penggandaan dan kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.

3.1.6 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan

Dalam pemenuhan tujuan meningkatkan ketangguhan masyarakat Jateng dalam penanggulangan bencana dan tujuan meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah sekretariat BPBD Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan program-program dan kegiatan sebagai berikut:

- a. Program penanggulangan bencana, program ini didukung oleh kegiatan kegiatan antara lain :
 - 1) Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi;
 - 2) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana;
 - 3) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana;
 - 4) Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana;
- b. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi, dalam upaya pemenuhan program tersebut didukung oleh kegiatan antara lain:
 - 1) Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
 - 2) Administrasi keuangan perangkat daerah;

- 3) Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah;
- 4) Administrasi kepegawaian perangkat daerah;
- 5) Administrasi umum perangkat daerah;
- 6) Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah;
- 7) Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah.

Tabel 17
Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak menunjang
1	Tujuan: Meningkatkan ketangguhan masyarakat Jateng dalam penanggulangan bencana	Indeks Ketahanan Daerah	102.24				
1.1	Meningkatnya upaya mitigasi, pencegahan, kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana	Persentase penambahan kapasitas PB diwilayah rawan bencana	103.50	Program Penanggulangan Bencana	Persentase penurunan risiko bencana	100	Menunjang
				Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Persentase desa yang memperoleh pelayanan informasi rawan bencana	429	Menunjang
				Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Persentase upaya PRB Jateng	102	Menunjang
1.2	Meningkatnya kapasitas penyelamatan dan penanganan masyarakat terdampak bencana	Persentase penambahan kapasitas relawan TRC/pemangku kepentingan PB	256.60	Program Penanggulangan Bencana	Persentase penanganan darurat kebencanaan	100	Menunjang
				Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah pemangku kepentingan yang dilatih	256	Menunjang

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak menunjang
				Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase laporan masyarakat tentang kejadian bencana yang ditindaklanjuti	100	Menunjang
1.3	Meningkatnya kapasitas dan upaya pemulihan pasca bencana	Persentase pemulihan pasca bencana yang terealisasi	100	Program Penanggulangan Bencana	Persentase rehab rekon pasca bencana	100	Menunjang
				Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Persentase wilayah terdampak bencana yang direhab/rekon pasca bencana	100	Menunjang
				Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah rekomendasi kerjasama yang diinisiasi dan dokumen kajian perencanaan pemulihan yang disusun	100	Menunjang
1.4	Persentase kecukupan kebutuhan dasar dan peralatan masyarakat terdampak yang terpenuhi	Persentase kecukupan kebutuhan dasar dan peralatan masyarakat terdampak yang terpenuhi	100	Program Penanggulangan Bencana	Persentase pemenuhan logistik bencana	100	Menunjang
				Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Persentase pengelolaan peralatan PB yang dilaksanakan	100	Menunjang
				Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase masyarakat terdampak yang tertangani	100	Menunjang

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak menunjang
2	Tujuan: Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah	Nilai Kepuasan Masyarakat	101.96				
2.1	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Nilai kepuasan masyarakat	101.96	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100	Menunjang
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	100	Menunjang
				Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	Menunjang
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	Menunjang
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	100	Menunjang
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	Menunjang

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak menunjang
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Menunjang
2.2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Sakip BPBD Prov Jateng	112.09	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	100	Menunjang
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	Menunjang

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan tujuan dan sasaran perangkat daerah seperti pada tabel 17 di tunjang beberapa program kegiatan dengan kinerja 100% dan ada beberapa kegiatan dengan persentase lebih dari 200%. Hal ini ada pada kegiatan pelayanan informasi rawan bencana provinsi yang di peroleh dari sub kegiatan identifikasi dan sosialisasi daerah rawan bencana dimana jumlah desa yang telah tersosialisasi daerah rawan bencana pada kegiatan idensos yang berjumlah 60 lokasi di bagi dengan jumlah daerah rawan 1400 dikalikan 100% menjadi 4.28% desa yang terfasilitasi daerah rawan bencana. Sedangkan kegiatan lainnya yang mendapatkan kinerja diatas 200% lainnya adalah kegiatan kegiatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dengan indikator kinerja jumlah pemangku kepentingan yang dilatih, hal ini terjadi karena percepatan pelaksanaan kegiatan & penambahan jumlah peserta, serta kegiatan dilaksanakan melalui metode *hybrid*, optimalisasi pelaksanaan bintek relawan TRC secara *hybrid*, peserta meningkat menjadi berjumlah 665 (165 luring dan 500 daring) dan Gubernur mengajar sebanyak 1.900 peserta (400 luring dan 1.500 daring).

3.2 Realisasi Anggaran

Disamping sumberdaya manusia, pelaksanaan kinerja instansi tentu saja tidak terlepas dari dukungan pendanaan. Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat BPBD Provinsi Jawa Tengah, pada tahun anggaran 2022, anggaran yang dipergunakan sebesar Rp. 15.614.548.737,- (96.60%) dari total anggaran sebesar Rp.16.163.495.000,- (Total Belanja) yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah. Penggunaan anggaran tersebut apabila diperinci dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

Tabel 18
Realisasi Anggaran

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
A	Program Penanggulangan Bencana	4,735,000,000	4,474,424,224	94,50
1	Bidang I	2.885.000.000	2.676.359.195	92,77
	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	1.250.000.000	1.214.713.402	97,18
	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	1.635.000.000	1.461.645.793	89,40
2	Bidang II	600.000.000	558.987.256	93,16
	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	200.000.000	198.209.000	99,10
	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	400.000.000	360.778.256	90,19
3	Bidang III	400.000.000	397.412.500	99,35
	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	250.000.000	247.928.500	99,17
	Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	150.000.000	149.484.000	99,66
4	Bidang IV	850.000.000	841.665.273	99,02
	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	300.000.000	294.542.937	98,18
	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	550.000.000	547.122.336	99,48
B	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	11.428.495.000	11.140.124.513	97,48
1	(Sekretariat) Umum dan Keuangan	11.178.495.000	10.903.769.709	97,54
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.263.495.000	6.237.457.468	99,58
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100.000.000	99.697.880	99,70
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10.000.000	10.000.000	100
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.206.000.000	1.102.682.450	91,43

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.789.000.000	2.653.214.345	95,13
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	810.000.000	800.717.566	98,85
2	(Sekretariat) Program	250.000.000	236.354.804	94,54
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	250.000.000	236.354.804	94,54

Uraian realisasi anggaran sebagai penunjang tujuan perangkat daerah pada BPBD Provinsi Jawa Tengah memiliki 2 (dua) tujuan, program urusan dan ex-BAU. Dalam upaya pemenuhan target sesuai dengan dokumen perencanaan dan perjanjian kinerja diperlukannya pendanaan untuk menunjang keberhasilan program dan kegiatan. Realisasi pada program kegiatan rata-rata pencapaian realisasi keuangan diatas 90% dan dengan target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja dan ada beberapa yang melebihi target kinerja dengan melakukan percepatan dan melakukan pemanfaatan media digital pada masa akhir pandemi covid-19 tahun 2022.

BAB IV

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah memiliki 2 (dua) tujuan, 6 (enam) sasaran, 2 (dua) program, 11 (sebelas) kegiatan dan 34 (tiga puluh empat) sub kegiatan. Dari keseluruhan pada program penanggulangan bencana yang diselenggarakan pada 4 (empat) bidang yaitu Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Penanganan Darurat, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi serta Bidang Peralatan dan Logistik dengan 4 (empat) jumlah indikator kinerja program dengan rata-rata tingkat ketercapaian indikator program 100%, 9 jumlah indikator kinerja kegiatan dengan rata-rata tingkat ketercapaian indikator kegiatan sebesar 100%, sedangkan tingkat kesesuaian kinerja program dan kegiatan adalah 100% dengan predikat tingkat kesesuaian kinerja program dan kegiatan yang diperoleh BPBD Provinsi Jawa Tengah untuk program penanggulangan bencana adalah “Sangat Tinggi”.

Sedangkan untuk program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi terdapat 2 (dua) indikator kinerja program dengan rata-rata tingkat ketercapaian indikator program adalah 100%, sedangkan jumlah indikator kinerja kegiatan berjumlah 7 kegiatan dengan rata-rata tingkat ketercapaian indikator kegiatan adalah 100% serta tingkat kesesuaian kinerja program dan kegiatan mencapai 100%, maka predikat tingkat kesesuaian kinerja program dan kegiatan pada BPBD Provinsi Jawa Tengah untuk program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi adalah “Sangat Tinggi”.

B. Rekomendasi

Mensikapi tantangan yang dihadapi selama ini, maka beberapa strategi perlu dirumuskan kembali untuk pencapaian dan peningkatan kualitas manfaat kegiatan PB, antara lain:

1. Memaksimalkan dokumen perencanaan dalam menyusun penanggulangan bencana di Jawa Tengah;
2. Memaksimalkan sosialisasi di daerah rawan bencana dengan tatap muka ataupun dengan media digital lainnya dengan menargetkan lokasi daerah rawan;
3. Memaksimalkan penggunaan Dana Desa dalam upaya mitigasi dan daryat bencana pada tingkat desa;
4. Memperbanyak kerjasama dan sinkronisasi serta koordinasi dengan berbagai sektor dalam penanggulangan bencana;
5. Meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana melalui pembentukan Desa Tangguh Bencana.
6. Meningkatkan pemasangan alat peringatan dini yang bermanfaat untuk masyarakat;
7. Meningkatkan upaya sosialisasi dan edukasi kebencanaan kepada masyarakat.